



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional;
- b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);

- Memperhatikan :
1. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Pengelolaan Belanja Lainnya Nomor S-964/AG/2018 tanggal 25 September 2018, hal Permintaan RKA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA.999.07) dan Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Berdasarkan Pagu Anggaran BUN TA 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disebut PATB adalah penanaman padi, jagung, dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung, dan/atau kedelai.

4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau budi daya ikan.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV.
10. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.

11. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
12. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh 1 (satu) anggota tim atau lebih yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan.
13. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
15. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
16. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
17. Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.
18. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.

BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI DAN
PENGUSULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA, dan NPK.

Pasal 4

Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERUNTUKAN DAN PENETAPAN
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RDKK sebagai berikut:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
 - c. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perusahaan perikanan budi daya.

Pasal 6

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perubahan jumlah alokasi provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 6, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi per provinsi.
- (3) Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator pengusulan Pupuk Bersubsidi wilayah provinsi untuk semua sub sektor.
- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.

- (5) Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2019.

Pasal 8

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- (3) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator pengusulan Pupuk Bersubsidi wilayah kabupaten/kota untuk semua sub sektor.
- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
- (5) Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2019.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 terjadi kekurangan atau kelebihan, pemenuhan Pupuk Bersubsidi dipenuhi melalui realokasi antarwilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.

- (2) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. realokasi antarprovinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. realokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
 - c. realokasi antarkecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antarkabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau realokasi antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antarkecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Penetapan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. serapan pupuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- b. rencana luas tanam;
- c. dosis spesifik wilayah; dan/atau
- d. ketersediaan alokasi Pupuk Bersubsidi.

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp1.800,00 per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp2.000,00 per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp1.400,00 per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp2.300,00 per kg; dan
 - e. Pupuk Organik = Rp500,00 per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di Pengecer Resmi secara tunai dalam volume sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg; dan
 - e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan nonsubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 13

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Kartu Tani.
- (3) Penerapan penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada wilayah kabupaten/kota tertentu sebagai ujicoba.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kartu Tani pada wilayah tertentu sebagai uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana Pasal 13 dilakukan Verifikasi dan/atau Validasi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Verifikasi dan/atau Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

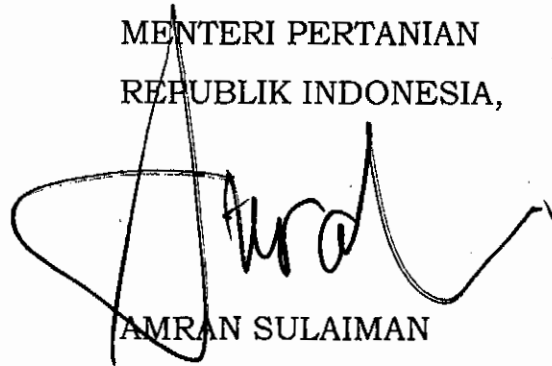
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amran', is written over the printed name 'AMRAN SULAIMAN'. The signature is stylized and somewhat cursive.

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2019
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

| NO. | PROPINSI | JENIS PUPUK (Ton) | | | | |
|-----|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|
| | | UREA | SP-36 | ZA | NPK | ORGANIK |
| 1 | ACEH | 54,400 | 16,668 | 9,247 | 35,249 | 6,605 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 96,893 | 32,155 | 29,107 | 78,129 | 15,625 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 56,055 | 28,112 | 13,883 | 58,359 | 10,809 |
| 4 | J A M B I | 27,491 | 20,213 | 10,264 | 55,759 | 6,974 |
| 5 | R I A U | 35,260 | 16,651 | 12,621 | 50,080 | 8,741 |
| 6 | BENGGKULU | 21,820 | 7,723 | 4,923 | 25,327 | 4,334 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 107,790 | 29,458 | 2,278 | 75,586 | 4,871 |
| 8 | BANGKA BELITUNG | 24,343 | 5,450 | 3,389 | 20,308 | 9,419 |
| 9 | LAMPUNG | 258,377 | 43,037 | 13,537 | 152,567 | 18,950 |
| 10 | KEP. RIAU | 40 | 10 | 10 | 143 | 70 |
| 11 | DKI. JAKARTA | 10 | 19 | - | 15 | 1 |
| 12 | BANTEN | 64,094 | 21,735 | 1,315 | 30,527 | 8,188 |
| 13 | JAWA BARAT | 531,043 | 154,833 | 70,708 | 291,251 | 70,405 |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 36,989 | 3,647 | 9,267 | 24,351 | 3,899 |
| 15 | JAWA TENGAH | 679,347 | 130,038 | 181,337 | 347,267 | 198,121 |
| 16 | JAWA TIMUR | 1,074,758 | 155,499 | 508,938 | 590,710 | 507,404 |
| 17 | B A L I | 31,173 | 1,028 | 3,239 | 19,204 | 5,298 |
| 18 | KALIMANTAN BARAT | 17,508 | 6,368 | 1,900 | 44,227 | 5,838 |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | 17,154 | 4,639 | 1,356 | 31,757 | 2,862 |
| 20 | KALIMANTAN SELATAN | 21,273 | 4,070 | 709 | 26,082 | 3,374 |
| 21 | KALIMANTAN TIMUR | 17,934 | 5,237 | 2,395 | 36,699 | 2,837 |
| 22 | KALIMANTAN UTARA | 1,497 | 127 | 32 | 4,642 | 163 |
| 23 | SULAWESI UTARA | 22,526 | 4,118 | 342 | 12,391 | 1,243 |
| 24 | GORONTALO | 34,253 | 1,725 | 830 | 28,878 | 1,684 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | 34,891 | 2,583 | 7,741 | 27,353 | 2,650 |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 21,467 | 7,609 | 4,581 | 18,608 | 5,731 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 305,534 | 48,803 | 72,740 | 136,666 | 23,493 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 28,777 | 2,401 | 9,162 | 22,655 | 1,725 |
| 29 | NUSA TENGGARA BARAT | 161,289 | 18,688 | 18,525 | 49,622 | 11,010 |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 27,702 | 3,107 | 627 | 16,971 | 2,415 |
| 31 | MALUKU | 3,362 | 323 | 229 | 2,645 | 815 |
| 32 | PAPUA | 7,522 | 2,654 | 576 | 8,375 | 2,247 |
| 33 | MALUKU UTARA | 1,301 | 141 | 128 | 1,865 | 74 |
| 34 | PAPUA BARAT | 1,127 | 131 | 64 | 1,732 | 125 |
| | JUMLAH | 3,825,000 | 779,000 | 996,000 | 2,326,000 | 948,000 |

MENTERI PERTANIAN,
 REPUBLIK INDONESIA

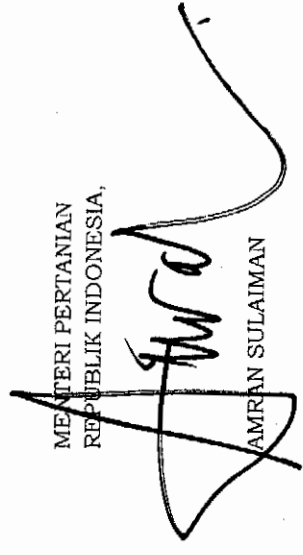


AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR **47/Permentan/SR.310/11/2018**
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2019 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

| JENIS PUPUK | SETAHUN | Bulan | | | | | | | | | | | | NOP | DES |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|-----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | | | |
| UREA | 3,825,000 | 347,678 | 287,698 | 309,400 | 321,795 | 312,343 | 230,625 | 254,431 | 239,018 | 268,760 | 297,199 | 408,877 | 547,178 | | |
| SP-36 | 779,000 | 69,074 | 86,765 | 92,234 | 80,169 | 69,050 | 38,252 | 58,354 | 44,430 | 56,750 | 62,792 | 60,872 | 60,259 | | |
| ZA | 996,000 | 92,685 | 88,385 | 98,865 | 89,995 | 78,624 | 51,367 | 81,097 | 69,714 | 78,497 | 88,329 | 90,649 | 87,792 | | |
| NPK | 2,326,000 | 158,641 | 199,556 | 222,484 | 209,512 | 194,008 | 126,724 | 176,857 | 147,703 | 171,328 | 184,355 | 269,301 | 265,530 | | |
| ORGANIK | 948,000 | 64,427 | 80,726 | 95,215 | 82,463 | 74,556 | 46,818 | 83,549 | 67,830 | 76,608 | 92,869 | 95,400 | 87,540 | | |
| JUMLAH PUPUK | 8,874,000 | 732,505 | 743,130 | 818,198 | 783,934 | 728,581 | 493,786 | 654,288 | 568,695 | 651,943 | 725,544 | 925,099 | 1,048,299 | | |

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

 AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II.1
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA BEBERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | PROVINSI | SETAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | ACEH | 54.400 | 4.759 | 6.374 | 3.686 | 3.825 | 5.058 | 3.844 | 4.420 | 3.161 | 3.018 | 4.479 | 5.036 | 6.737 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 96.893 | 5.050 | 8.887 | 9.462 | 8.967 | 8.177 | 4.563 | 7.297 | 7.334 | 9.095 | 9.794 | 7.811 | 10.454 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 56.055 | 4.637 | 4.388 | 4.651 | 5.825 | 4.347 | 2.503 | 4.548 | 4.097 | 5.106 | 4.534 | 4.883 | 6.537 |
| 4 | J A M B I | 27.491 | 1.713 | 2.837 | 1.707 | 2.179 | 1.836 | 1.047 | 1.229 | 1.513 | 2.461 | 2.288 | 3.328 | 4.452 |
| 5 | R I A U | 35.260 | 2.053 | 2.875 | 2.523 | 2.779 | 2.707 | 1.084 | 3.109 | 2.754 | 3.353 | 2.361 | 4.132 | 5.531 |
| 6 | BENGKULU | 21.820 | 1.792 | 2.420 | 1.824 | 2.025 | 1.899 | 1.108 | 1.142 | 1.744 | 1.580 | 2.023 | 1.823 | 2.440 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 107.790 | 8.723 | 9.741 | 9.127 | 9.396 | 9.160 | 6.710 | 7.024 | 5.102 | 6.642 | 10.875 | 10.817 | 14.476 |
| 8 | BANGKA BELITUNG | 24.343 | 1.116 | 1.983 | 2.214 | 1.776 | 1.875 | 1.248 | 1.831 | 2.071 | 1.712 | 3.074 | 2.328 | 3.115 |
| 9 | LAMPUNG | 258.377 | 29.681 | 25.028 | 22.748 | 20.635 | 23.286 | 16.845 | 16.684 | 12.182 | 17.776 | 20.227 | 22.788 | 30.498 |
| 10 | KEP. RIAU | 40 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 1 | 12 | - | 8 | 10 |
| 11 | DKI JAKARTA | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 |
| 12 | BANTEN | 64.094 | 5.365 | 4.833 | 4.956 | 6.620 | 5.922 | 3.599 | 3.466 | 2.648 | 2.773 | 2.776 | 9.039 | 12.096 |
| 13 | JAWA BARAT | 531.043 | 51.895 | 31.594 | 39.527 | 50.967 | 52.150 | 33.617 | 34.300 | 29.611 | 30.574 | 24.356 | 65.198 | 87.254 |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 36.989 | 2.862 | 1.825 | 2.352 | 2.624 | 2.167 | 1.248 | 2.236 | 2.816 | 5.206 | 3.485 | 4.349 | 5.818 |
| 15 | JAWA TENGAH | 679.347 | 54.144 | 55.480 | 65.394 | 58.497 | 50.899 | 34.785 | 43.575 | 38.055 | 48.778 | 55.398 | 74.560 | 99.778 |
| 16 | JAWA TIMUR | 1.074.758 | 76.784 | 60.396 | 83.098 | 84.935 | 73.990 | 63.003 | 75.933 | 87.102 | 83.999 | 97.998 | 122.963 | 164.557 |
| 17 | B A L I | 31.173 | 3.682 | 2.875 | 2.015 | 1.795 | 2.309 | 2.282 | 2.334 | 2.425 | 2.685 | 2.045 | 2.877 | 3.849 |
| 18 | KALIMANTAN BARAT | 17.508 | 1.191 | 1.547 | 1.427 | 1.275 | 1.539 | 948 | 1.338 | 1.190 | 1.166 | 1.431 | 1.905 | 2.549 |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | 17.154 | 1.559 | 1.603 | 2.334 | 1.823 | 1.899 | 1.203 | 653 | 692 | 755 | 1.014 | 1.549 | 2.071 |
| 20 | KALIMANTAN SELATAN | 21.273 | 2.762 | 2.154 | 2.168 | 2.843 | 1.960 | 950 | 621 | 669 | 800 | 1.743 | 1.968 | 2.635 |
| 21 | KALIMANTAN TIMUR | 17.934 | 1.733 | 1.794 | 1.485 | 1.548 | 1.590 | 1.083 | 1.446 | 1.179 | 869 | 1.087 | 1.762 | 2.359 |
| 22 | KALIMANTAN UTARA | 1.497 | 30 | 176 | 122 | 165 | 117 | 27 | 46 | 7 | 122 | 58 | 268 | 359 |
| 23 | SULAWESI UTARA | 22.526 | 2.064 | 2.032 | 2.262 | 1.724 | 1.740 | 1.283 | 1.099 | 1.249 | 1.611 | 1.473 | 2.561 | 3.427 |
| 24 | GORONTALO | 34.253 | 2.051 | 3.319 | 2.973 | 2.955 | 1.985 | 1.578 | 1.589 | 1.952 | 2.755 | 2.921 | 4.352 | 5.823 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | 34.891 | 4.875 | 3.400 | 2.248 | 2.205 | 3.121 | 3.129 | 3.365 | 1.610 | 2.946 | 1.373 | 2.830 | 3.785 |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 21.467 | 2.541 | 1.765 | 2.018 | 1.305 | 1.468 | 1.595 | 1.595 | 1.778 | 1.929 | 1.166 | 1.843 | 2.466 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 305.534 | 42.579 | 21.839 | 20.656 | 25.776 | 34.733 | 27.544 | 18.439 | 14.724 | 17.365 | 18.823 | 26.967 | 36.089 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 28.777 | 2.916 | 1.978 | 2.078 | 2.371 | 3.481 | 2.635 | 1.107 | 1.487 | 2.283 | 1.915 | 2.791 | 3.734 |
| 29 | NUSA TENGGARA BARAT | 161.289 | 25.815 | 14.399 | 9.410 | 11.879 | 11.136 | 11.294 | 9.534 | 7.753 | 8.153 | 12.518 | 16.850 | 22.547 |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 27.702 | 5.137 | 4.163 | 2.131 | 1.361 | 863 | 1.055 | 1.829 | 1.716 | 1.601 | 1.931 | 2.530 | 3.384 |
| 31 | MALUKU | 3.362 | 486 | 425 | 210 | 177 | 248 | 33 | 455 | 200 | 185 | 174 | 329 | 438 |
| 32 | PAPUA | 7.522 | 658 | 1.115 | 632 | 629 | 656 | 410 | 480 | 423 | 506 | 462 | 664 | 888 |
| 33 | MALUKU UTARA | 1.301 | - | 112 | 96 | 173 | 37 | 14 | 15 | 50 | 44 | 152 | 260 | 348 |
| 34 | PAPUA BARAT | 1.127 | 27 | 162 | 55 | 32 | 55 | 46 | 152 | 80 | 16 | 124 | 162 | 216 |
| | JUMLAH PROPINSI | 3.825.000 | 350.680 | 283.519 | 307.589 | 321.090 | 312.410 | 232.313 | 253.799 | 239.376 | 267.876 | 294.078 | 411.534 | 550.724 |

LAMPIRAN II.2
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR **47/Permentan/SR.310/11/2018**
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | PROVINSI | SETAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES |
|-----|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | ACEH | 16,668 | 1,249 | 2,530 | 1,655 | 1,555 | 1,852 | 984 | 1,334 | 943 | 840 | 1,251 | 1,244 | 1,230 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 32,155 | 897 | 4,127 | 4,627 | 3,775 | 2,979 | 1,519 | 2,778 | 2,128 | 2,177 | 2,369 | 2,603 | 2,577 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 28,112 | 1,237 | 4,480 | 4,316 | 2,766 | 1,955 | 842 | 1,777 | 1,508 | 2,393 | 3,107 | 1,876 | 1,856 |
| 4 | JAMBI | 20,213 | 1,446 | 2,900 | 2,925 | 1,951 | 1,439 | 942 | 1,588 | 1,237 | 1,830 | 1,160 | 1,405 | 1,390 |
| 5 | RIAU | 16,651 | 564 | 1,994 | 2,755 | 1,793 | 1,611 | 539 | 1,245 | 944 | 956 | 1,734 | 1,265 | 1,252 |
| 6 | BENGKULU | 7,723 | 133 | 1,462 | 1,056 | 829 | 827 | 305 | 458 | 189 | 438 | 502 | 765 | 756 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 29,458 | 849 | 3,773 | 1,990 | 3,402 | 3,569 | 1,447 | 2,487 | 2,259 | 2,597 | 3,529 | 1,786 | 1,769 |
| 8 | BANGKA BELITUNG | 5,450 | 179 | 700 | 650 | 687 | 449 | 337 | 526 | 250 | 219 | 516 | 471 | 465 |
| 9 | LAMPUNG | 43,037 | 3,509 | 6,239 | 5,385 | 3,522 | 4,560 | 1,804 | 3,507 | 2,223 | 2,779 | 3,062 | 3,241 | 3,209 |
| 10 | KEP. RIAU | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 11 | DKI JAKARTA | 19 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | BANTEN | 21,735 | 2,712 | 1,932 | 2,673 | 2,748 | 1,640 | 1,244 | 1,566 | 935 | 1,267 | 1,592 | 1,722 | 1,706 |
| 13 | JAWA BARAT | 154,833 | 19,947 | 14,095 | 14,675 | 15,659 | 14,279 | 8,479 | 11,416 | 8,225 | 11,343 | 8,898 | 13,979 | 13,839 |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 3,647 | 387 | 347 | 423 | 339 | 273 | 175 | 272 | 259 | 283 | 302 | 296 | 294 |
| 15 | JAWA TENGAH | 130,038 | 10,896 | 13,186 | 16,774 | 13,804 | 9,690 | 5,735 | 7,853 | 7,094 | 10,653 | 12,163 | 11,151 | 11,038 |
| 16 | JAWA TIMUR | 155,499 | 16,144 | 13,860 | 17,857 | 14,223 | 12,794 | 7,670 | 12,930 | 10,285 | 13,018 | 13,735 | 11,550 | 11,432 |
| 17 | BALI | 1,028 | 101 | 68 | 100 | 140 | 44 | 47 | 93 | 48 | 196 | 48 | 72 | 70 |
| 18 | KALIMANTAN BARAT | 6,368 | 215 | 635 | 1,040 | 900 | 556 | 183 | 804 | 479 | 575 | 358 | 313 | 309 |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | 4,639 | 346 | 899 | 714 | 475 | 833 | 202 | 178 | 124 | 114 | 229 | 264 | 261 |
| 20 | KALIMANTAN SELATAN | 4,070 | 485 | 795 | 640 | 309 | 492 | 199 | 200 | 174 | 237 | 230 | 155 | 155 |
| 21 | KALIMANTAN TIMUR | 5,237 | 176 | 926 | 618 | 489 | 565 | 297 | 521 | 409 | 319 | 381 | 270 | 265 |
| 22 | KALIMANTAN UTARA | 127 | - | 5 | 12 | - | 5 | - | 13 | - | - | 22 | 35 | 32 |
| 23 | SULAWESI UTARA | 4,118 | 166 | 566 | 411 | 418 | 485 | 389 | 157 | 326 | 342 | 335 | 263 | 260 |
| 24 | GORONTALO | 1,725 | 93 | 232 | 171 | 143 | 67 | 118 | 115 | 55 | 179 | 199 | 177 | 176 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | 2,583 | 128 | 496 | 440 | 303 | 323 | 132 | 248 | 174 | 198 | 21 | 60 | 60 |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 7,609 | 1,080 | 845 | 1,036 | 994 | 544 | 541 | 487 | 456 | 487 | 515 | 314 | 309 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 48,803 | 6,085 | 5,056 | 5,232 | 5,654 | 4,884 | 2,854 | 3,449 | 2,442 | 2,062 | 4,553 | 3,231 | 3,199 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 2,401 | 351 | 331 | 317 | 299 | 139 | 177 | 129 | 61 | 136 | 114 | 175 | 175 |
| 29 | NUSA TENGGARA BARAT | 18,688 | 1,586 | 1,825 | 2,276 | 2,751 | 1,245 | 1,201 | 1,188 | 437 | 645 | 856 | 2,351 | 2,329 |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 3,107 | 631 | 590 | 214 | 121 | 181 | 62 | 383 | 200 | 172 | 177 | 189 | 188 |
| 31 | MALUKU | 323 | 23 | 44 | 77 | 22 | 20 | 14 | 13 | 11 | 14 | 46 | 20 | 18 |
| 32 | PAPUA | 2,654 | 378 | 484 | 406 | 182 | 205 | 277 | 301 | 78 | 57 | 173 | 57 | 54 |
| 33 | MALUKU UTARA | 141 | 15 | 15 | 20 | 13 | 9 | 2 | 5 | 8 | 27 | 7 | 10 | 8 |
| 34 | PAPUA BARAT | 131 | 2 | 45 | 6 | 11 | 3 | 5 | 9 | 11 | 25 | 4 | 4 | 3 |
| | JUMLAH PROVINSI | 779,000 | 72,010 | 85,482 | 91,494 | 79,881 | 68,518 | 38,722 | 58,039 | 43,973 | 56,579 | 62,290 | 61,319 | 60,688 |

LAMPIRAN II.3
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR **47/Permentan/SR.310/11/2018**
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | PROVINSI | SETAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES |
|-----|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | ACEH | 9,247 | 801 | 1,220 | 889 | 731 | 743 | 433 | 530 | 301 | 353 | 688 | 1,298 | 1,258 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 29,107 | 881 | 2,920 | 3,747 | 3,193 | 2,913 | 1,165 | 2,795 | 1,944 | 2,315 | 2,692 | 2,308 | 2,234 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 13,883 | 412 | 1,807 | 2,036 | 1,616 | 955 | 233 | 1,204 | 724 | 1,062 | 1,232 | 1,322 | 1,279 |
| 4 | J A M B I | 10,264 | 664 | 1,560 | 996 | 1,014 | 584 | 329 | 806 | 357 | 854 | 712 | 1,214 | 1,175 |
| 5 | R I A U | 12,621 | 657 | 1,587 | 1,901 | 1,352 | 1,261 | 340 | 921 | 731 | 790 | 1,036 | 1,038 | 1,006 |
| 6 | BENGGULU | 4,923 | 58 | 738 | 591 | 508 | 283 | 147 | 276 | 305 | 265 | 195 | 790 | 765 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 2,278 | 22 | 337 | 246 | 311 | 331 | 54 | 217 | 155 | 167 | 127 | 158 | 153 |
| 8 | BANGKA BELITUNG | 3,389 | 299 | 813 | 306 | 589 | 216 | 36 | 15 | 69 | 37 | 207 | 407 | 394 |
| 9 | LAMPUNG | 13,537 | 725 | 1,720 | 2,438 | 1,405 | 782 | 420 | 1,344 | 971 | 1,257 | 742 | 880 | 853 |
| 10 | KEP. RIAU | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 |
| 11 | DKI. JAKARTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BANTEN | 1,315 | 47 | 109 | 203 | 128 | 132 | 84 | 122 | 40 | 70 | 74 | 155 | 150 |
| 13 | JAWA BARAT | 70,708 | 9,550 | 6,158 | 7,024 | 6,831 | 6,719 | 3,664 | 4,347 | 3,173 | 4,880 | 4,697 | 6,941 | 6,725 |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 9,267 | 880 | 530 | 749 | 819 | 726 | 574 | 761 | 621 | 697 | 931 | 1,006 | 975 |
| 15 | JAWA TENGAH | 181,337 | 15,340 | 16,165 | 20,115 | 16,947 | 13,868 | 9,633 | 12,847 | 9,958 | 13,848 | 16,592 | 18,299 | 17,724 |
| 16 | JAWA TIMUR | 508,938 | 51,601 | 38,954 | 44,599 | 41,968 | 37,855 | 26,728 | 46,383 | 44,722 | 43,829 | 47,937 | 42,856 | 41,507 |
| 17 | B A L I | 3,239 | 505 | 184 | 134 | 230 | 174 | 158 | 223 | 326 | 618 | 150 | 273 | 263 |
| 18 | KALIMANTAN BARAT | 1,900 | 114 | 157 | 257 | 126 | 135 | 36 | 292 | 137 | 165 | 135 | 176 | 172 |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | 1,356 | 67 | 319 | 157 | 118 | 278 | 57 | 43 | 17 | 38 | 42 | 111 | 107 |
| 20 | KALIMANTAN SELATAN | 709 | 92 | 122 | 92 | 68 | 87 | 20 | 42 | 26 | 53 | 51 | 28 | 30 |
| 21 | KALIMANTAN TIMUR | 2,395 | 39 | 499 | 261 | 202 | 186 | 87 | 171 | 63 | 60 | 145 | 346 | 336 |
| 22 | KALIMANTAN UTARA | 32 | - | 2 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 23 | SULAWESI UTARA | 342 | - | 25 | 44 | 6 | 83 | 17 | 19 | 15 | 8 | 15 | 55 | 53 |
| 24 | GORONTALO | 830 | - | 52 | 58 | 134 | 76 | 52 | 44 | 1 | 8 | 131 | 139 | 135 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | 7,741 | 545 | 1,119 | 774 | 713 | 851 | 418 | 973 | 532 | 634 | 229 | 484 | 469 |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 4,581 | 282 | 808 | 346 | 338 | 366 | 219 | 324 | 339 | 362 | 282 | 464 | 449 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 72,740 | 8,566 | 5,841 | 6,891 | 7,303 | 6,091 | 4,812 | 4,382 | 4,019 | 5,117 | 6,483 | 6,724 | 6,510 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 9,162 | 1,046 | 939 | 939 | 964 | 772 | 635 | 470 | 205 | 361 | 909 | 977 | 945 |
| 29 | NUSA TENGGARA BARAT | 18,525 | 1,528 | 2,548 | 1,586 | 1,665 | 1,494 | 1,410 | 1,375 | 732 | 898 | 1,864 | 1,739 | 1,685 |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 627 | 74 | 69 | 56 | 59 | 51 | 13 | 38 | 28 | 44 | 37 | 82 | 79 |
| 31 | MALUKU | 229 | 31 | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | 2 | 7 | - | 28 | 32 | 31 |
| 32 | PAPUA | 576 | 33 | 57 | 26 | 53 | 56 | 35 | 67 | 28 | 24 | 59 | 70 | 69 |
| 33 | MALUKU UTARA | 128 | 2 | 14 | 24 | 13 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 5 | 18 | 18 |
| 34 | PAPUA BARAT | 64 | - | 27 | 7 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| | JUMLAH PROPINSI | 996,000 | 94,861 | 87,410 | 97,537 | 89,420 | 78,109 | 51,823 | 81,045 | 70,550 | 78,833 | 88,433 | 90,408 | 87,566 |

LAMPIRAN II.4
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | PROVINSI | SETAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | ACEH | 35,249 | 2,387 | 2,901 | 2,842 | 2,702 | 3,147 | 1,783 | 2,222 | 2,117 | 2,923 | 3,996 | 4,144 | 4,087 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 78,129 | 2,306 | 9,618 | 9,925 | 6,371 | 6,588 | 4,631 | 8,862 | 6,353 | 8,343 | 5,892 | 4,652 | 4,588 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 58,359 | 3,470 | 7,060 | 5,661 | 5,178 | 5,144 | 3,301 | 5,037 | 2,951 | 3,289 | 4,829 | 6,266 | 6,178 |
| 4 | JAMBI | 55,759 | - | - | - | 7,435 | 4,832 | - | 30,482 | - | 5,576 | 3,717 | 1,859 | 1,859 |
| 5 | RIAU | 50,080 | - | - | 8,347 | 8,347 | - | - | - | 16,693 | - | - | 8,347 | 8,346 |
| 6 | BENGKULU | 25,327 | 2,433 | 1,807 | 1,877 | 2,364 | 2,716 | 1,590 | 1,752 | 852 | 1,058 | 1,068 | 3,932 | 3,878 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 75,586 | 7,395 | 5,049 | 5,737 | 7,581 | 7,523 | 4,432 | 5,013 | 4,170 | 4,400 | 3,878 | 10,276 | 10,132 |
| 8 | BANGKA BELITUNG | 20,308 | 1,493 | 1,441 | 1,659 | 1,830 | 1,518 | 938 | 1,181 | 1,281 | 1,828 | 2,176 | 2,499 | 2,464 |
| 9 | LAMPUNG | 152,567 | 8,287 | 12,099 | 16,119 | 13,483 | 10,590 | 7,022 | 10,044 | 8,785 | 11,999 | 12,903 | 20,764 | 20,473 |
| 10 | KEP. RIAU | 143 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| 11 | DKI. JAKARTA | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | BANTEN | 30,527 | 1,646 | 3,153 | 2,876 | 1,785 | 2,982 | 2,749 | 2,833 | 1,806 | 2,190 | 2,502 | 3,024 | 2,982 |
| 13 | JAWA BARAT | 291,251 | 31,695 | 26,690 | 20,578 | 24,871 | 18,186 | 19,522 | 25,422 | 18,965 | 16,106 | 26,247 | 31,703 | 31,261 |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 24,351 | 2,738 | 2,238 | 2,580 | 3,428 | 2,036 | 1,247 | 1,217 | 840 | 1,180 | 1,908 | 2,487 | 2,452 |
| 15 | JAWA TENGAH | 347,267 | 36,226 | 36,644 | 38,104 | 30,337 | 29,237 | 24,118 | 29,588 | 16,916 | 12,604 | 22,220 | 35,885 | 35,391 |
| 16 | JAWA TIMUR | 590,710 | 18,255 | 76,869 | 61,039 | 73,019 | 52,197 | 28,238 | 20,394 | 18,540 | 28,523 | 69,026 | 72,876 | 71,735 |
| 17 | BALI | 19,204 | 746 | 1,717 | 2,192 | 1,540 | 2,147 | 1,314 | 1,264 | 1,263 | 1,479 | 1,227 | 2,173 | 2,141 |
| 18 | KALIMANTAN BARAT | 44,227 | 803 | 4,193 | 4,027 | 5,243 | 2,926 | 1,737 | 2,532 | 2,713 | 4,576 | 7,348 | 4,093 | 4,033 |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | 31,757 | 2,293 | 3,370 | 3,964 | 3,141 | 3,727 | 1,810 | 2,618 | 1,872 | 2,343 | 1,079 | 2,790 | 2,752 |
| 20 | KALIMANTAN SELATAN | 26,082 | 2,074 | 3,072 | 1,327 | 3,094 | 2,254 | 971 | 2,554 | 2,039 | 2,121 | 1,986 | 2,312 | 2,279 |
| 21 | KALIMANTAN TIMUR | 36,699 | 2,528 | 2,417 | 3,027 | 3,633 | 4,091 | 2,990 | 2,904 | 1,936 | 1,794 | 2,525 | 4,458 | 4,395 |
| 22 | KALIMANTAN UTARA | 4,642 | 359 | 474 | 412 | 375 | 465 | 289 | 347 | 181 | 251 | 334 | 582 | 573 |
| 23 | SULAWESI UTARA | 12,391 | 1,578 | 1,200 | 786 | 940 | 864 | 816 | 874 | 585 | 829 | 1,162 | 1,388 | 1,369 |
| 24 | GORONTALO | 28,878 | 4,784 | 4,615 | 2,483 | 1,224 | 1,353 | 1,100 | 2,110 | 1,917 | 1,337 | 1,578 | 3,211 | 3,165 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | 27,353 | 1,552 | 951 | 3,249 | 2,221 | 2,687 | 2,231 | 2,609 | 3,094 | 4,074 | 669 | 2,018 | 1,998 |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 18,608 | 1,588 | 2,670 | 2,344 | 1,694 | 1,603 | 872 | 1,469 | 801 | 1,526 | 810 | 1,626 | 1,605 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 136,666 | 9,065 | 12,087 | 18,062 | 21,564 | 8,928 | 4,601 | 6,250 | 6,868 | 13,873 | 15,384 | 10,095 | 9,888 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 22,655 | 184 | 3,245 | 2,070 | 710 | 1,029 | 2,486 | 2,915 | 2,314 | 1,347 | 882 | 2,755 | 2,719 |
| 29 | NUSA TENGGARA BARAT | 49,622 | 3,384 | 4,257 | 4,746 | 4,470 | 4,139 | 2,703 | 3,773 | 3,151 | 3,655 | 3,933 | 5,745 | 5,665 |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 16,971 | 2,812 | 2,712 | 1,459 | 719 | 795 | 646 | 1,240 | 1,127 | 786 | 927 | 1,887 | 1,862 |
| 31 | MALUKU | 2,645 | 150 | 92 | 314 | 215 | 260 | 216 | 252 | 299 | 394 | 65 | 195 | 193 |
| 32 | PAPUA | 8,375 | 715 | 1,202 | 1,055 | 763 | 721 | 393 | 661 | 361 | 364 | 687 | 732 | 722 |
| 33 | MALUKU UTARA | 1,865 | 124 | 165 | 246 | 294 | 122 | 63 | 85 | 94 | 189 | 210 | 138 | 135 |
| 34 | PAPUA BARAT | 1,732 | 14 | 248 | 158 | 54 | 79 | 190 | 223 | 177 | 103 | 67 | 211 | 207 |
| | JUMLAH PROPINSI | 2,326,000 | 153,096 | 234,267 | 229,279 | 240,638 | 184,897 | 125,007 | 178,746 | 114,380 | 157,047 | 201,964 | 255,141 | 251,544 |

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERJINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | PROVINSI | SETAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES |
|-----|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | ACEH | 6.605 | 399 | 736 | 784 | 718 | 913 | 246 | 730 | 261 | 549 | 528 | 387 | 354 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 15.625 | 1.747 | 1.115 | 1.972 | 1.688 | 639 | 642 | 1.406 | 1.260 | 1.024 | 1.240 | 1.507 | 1.386 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 10.809 | 773 | 941 | 1.432 | 848 | 539 | 492 | 1.005 | 995 | 910 | 911 | 1.023 | 940 |
| 4 | J A M B I | 6.974 | 274 | 448 | 583 | 1.206 | 463 | 314 | 349 | 100 | 976 | 100 | 1.126 | 1.036 |
| 5 | R I A U | 8.741 | 1.143 | 851 | 795 | 1.099 | 561 | 385 | 721 | 425 | 639 | 749 | 716 | 657 |
| 6 | BENGGKULU | 4.334 | 246 | 382 | 539 | 603 | 269 | 349 | 800 | 167 | 205 | 172 | 315 | 286 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 4.871 | 221 | 930 | 539 | 295 | 443 | 74 | 494 | 509 | 413 | 384 | 295 | 272 |
| 8 | BANGKA BELITUNG | 9.419 | 123 | 1.358 | 443 | 896 | 703 | 448 | 1.335 | 208 | 406 | 962 | 1.325 | 1.211 |
| 9 | LAMPUNG | 18.950 | 2.527 | 316 | 1.263 | 948 | 2.527 | - | 632 | 632 | - | 5.369 | 2.843 | 2.526 |
| 10 | KEP. RIAU | 70 | - | 14 | - | 4 | 2 | - | 6 | 7 | 25 | - | 6 | 6 |
| 11 | DKI. JAKARTA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | BANTEN | 8.188 | 776 | 881 | 444 | 747 | 1.002 | 338 | 1.028 | 312 | 497 | 704 | 761 | 698 |
| 13 | JAWA BARAT | 70.405 | 5.375 | 4.343 | 5.598 | 4.940 | 8.870 | 5.757 | 5.923 | 4.209 | 3.906 | 5.443 | 8.574 | 7.867 |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 3.899 | 159 | 243 | 252 | 363 | 469 | 409 | 683 | 202 | 302 | 114 | 365 | 336 |
| 15 | JAWA TENGAH | 198.121 | 13.522 | 18.259 | 20.344 | 18.234 | 15.199 | 9.983 | 15.909 | 11.773 | 16.182 | 19.121 | 20.649 | 18.947 |
| 16 | JAWA TIMUR | 507.404 | 38.936 | 41.497 | 51.675 | 43.500 | 35.937 | 22.135 | 44.613 | 38.875 | 41.582 | 51.460 | 50.684 | 46.510 |
| 17 | B A L I | 5.298 | 413 | 274 | 419 | 305 | 384 | 439 | 406 | 318 | 450 | 707 | 618 | 568 |
| 18 | KALIMANTAN BARAT | 5.838 | 163 | 331 | 719 | 608 | 466 | 254 | 652 | 478 | 635 | 424 | 578 | 532 |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | 2.862 | 11 | 205 | 720 | 400 | 295 | 87 | 84 | 140 | 56 | 111 | 393 | 361 |
| 20 | KALIMANTAN SELATAN | 3.374 | 249 | 361 | 450 | 307 | 470 | 171 | 229 | 220 | 287 | 223 | 213 | 195 |
| 21 | KALIMANTAN TIMUR | 2.837 | 54 | 429 | 235 | 290 | 180 | 177 | 356 | 139 | 227 | 402 | 183 | 168 |
| 22 | KALIMANTAN UTARA | 163 | - | 13 | 30 | 9 | 15 | 3 | 19 | 15 | 7 | 22 | 15 | 16 |
| 23 | SULAWESI UTARA | 1.243 | 13 | 229 | 106 | 83 | 177 | 83 | 31 | 151 | 36 | 93 | 126 | 116 |
| 24 | GORONTALO | 1.684 | 52 | 191 | 126 | 205 | 18 | 84 | 83 | 6 | 372 | 86 | 241 | 218 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | 2.650 | 160 | 295 | 314 | 288 | 366 | 99 | 293 | 105 | 220 | 212 | 155 | 143 |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 5.731 | 641 | 409 | 723 | 619 | 234 | 236 | 516 | 462 | 376 | 455 | 553 | 507 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 23.493 | 1.681 | 2.046 | 3.112 | 1.843 | 1.171 | 1.070 | 2.184 | 2.163 | 1.979 | 1.980 | 2.224 | 2.040 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 1.725 | 68 | 111 | 144 | 298 | 115 | 78 | 86 | 25 | 242 | 25 | 278 | 258 |
| 29 | NUSA TENGGARA BARAT | 11.010 | 1.440 | 1.072 | 1.001 | 1.384 | 706 | 484 | 909 | 536 | 804 | 944 | 901 | 830 |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2.415 | 137 | 213 | 300 | 336 | 150 | 194 | 446 | 93 | 114 | 96 | 176 | 159 |
| 31 | MALUKU | 815 | 37 | 156 | 90 | 49 | 74 | 12 | 83 | 85 | 69 | 64 | 49 | 45 |
| 32 | PAPUA | 2.247 | 29 | 324 | 106 | 214 | 168 | 107 | 318 | 50 | 97 | 230 | 316 | 290 |
| 33 | MALUKU UTARA | 74 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | 21 | 11 | 11 |
| 34 | PAPUA BARAT | 125 | 1 | 26 | - | 6 | 3 | - | 10 | 13 | 45 | 1 | 11 | 8 |
| | JUMLAH PROPINSI | 948.000 | 71.380 | 79.000 | 95.263 | 83.337 | 73.538 | 45.150 | 81.307 | 64.936 | 73.632 | 93.353 | 97.617 | 89.498 |